

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara berkembang, tentunya ingin dapat bersaing dengan Negara-Negara berkembang bahkan Negara maju yang ada. Negara maju adalah Negara yang tingkat tingkat pembangunannya sudah tercapai. Sedangkan, Negara berkembang adalah Negara yang tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih di tahap menengah atau sedang.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat hasil pembangunan yang telah dilakukan pemerintah dan juga berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan adanya peningkatan dalam perekonomian negara tersebut sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang negatif menunjukkan adanya penurunan perekonomian dalam negara tersebut.

Menurut Jhingan (2008) pengertian pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi, kemajuan ekonomi, kesejahteraan ekonomi memiliki arti yang sama yaitu proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi bersifat dinamis, melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu (Boediono, 1982). Pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian satu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan selalu dalam ukuran persen (Sukirno, 2010). Indikator yang digunakan untuk

melihat pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010. PDB Indonesia pada tahun 2019 atas dasar harga berlaku mencapai Rp14.837,4 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 merupakan capaian PDB tertinggi sejak lima tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi ditopang oleh permintaan domestik, sebagai dampak berlanjutnya proyek infrastruktur yang kemudian memberikan dampak pengganda kepada konsumsi rumah tangga dan investasi bangunan dan nonbangunan (BI.go.id : 2019). Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia tahun 2016 tumbuh sebesar 4,8%, di mana PDB dasar harga konstan (2010) mencapai Rp 8.982,5 triliun.

Menurut Rustan (2019) salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah infrastruktur dalam negara tersebut. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa infrastruktur yang baik di suatu negara akan mampu mendorong peningkatan ekonomi di negara tersebut. Karena infrastruktur yang layak dan memadai akan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. KBBI (2021) Infrastruktur dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, jalan, jembatan, sanitasi, telepon, dan sebagainya. Lebih jauh lagi, dalam ilmu ekonomi infrastruktur merupakan wujud dari *public capital* (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah (Mankiw 2003: 38). Familoni (2004: 16) menyebut infrastruktur sebagai *basic essential service* dalam proses pembangunan maksudnya adalah layanan yang kebutuhannya akan terus ada di masyarakat. Sedangkan definisi lain infrastruktur menurut peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015, infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem,

perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Kementerian Keuangan (2022) infrastruktur adalah semua struktur dan fasilitas dasar, baik fisik maupun sosial (misalnya bangunan, jalan, dan pasokan listrik) yang diperlukan untuk operasional kegiatan masyarakat atau perusahaan, yang dibagi kedalam 2 kelompok, yakni Infrastruktur Ekonomi (*Economic Infrastructure*) yang meliputi transportasi, jalan, irigasi, air minum, kawasan, pengelolaan sampah, dan masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya Infrastruktur Sosial (*Sosial Infrastructure*) yakni fasilitas pendidikan, penelitian, pemasyarakatan, dan kesehatan. Didalam penelitian ini lebih fokus kepada Infrastruktur Sosial yaitu pendidikan dan kesehatan.

Menurut Mankiw (2007:182) Peningkatan modal manusia dapat mengacu pada sarana dan prasarana bidang pendidikan, selain dari pada itu hal yang dianggap penting lainnya adalah investasi yang mendorong ke arah populasi yang sehat yaitu sarana dan prasarana dalam bidang kesehatan. Pemberdayaan sumber daya untuk membangun infrastruktur akan memicu proses ekonomi sehingga menimbulkan penggandaan dampak ekonomi maupun sosial (Setiadi, 2016). Maksud dari penggandaan dampak ekonomi disini adalah dengan infrastruktur yang memadai dalam suatu daerah dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat juga perekonomian negara tersebut.

World Bank mengatakan pendidikan merupakan investasi dalam menumbuhkan ekonomi karena memberdayakan sumber daya manusia dengan berbagai keterampilan guna menumbuhkan ide-ide baru untuk produk, layanan, dan teknologi baru, tetapi ini membutuhkan kebijakan pemerintah yang proaktif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di semua negara di dunia. Pendidikan tidak hanya berjalan sendiri, perlu juga kesehatan dalam rangka mencapai Sumber daya Manusia yang unggul dan berkualitas. Hal tersebut karena pendidikan dan pengetahuan saja tidak cukup, harus ditunjang dengan fisik yang sehat agar dapat produktif dan nantinya dapat menggunakan kemampuan dengan maksimal. Kemampuan kognitif bukanlah satu-satunya dimensi dari sumber daya manusia yang diperhitungkan, kesehatan juga penting. “orang yang lebih sehat cenderung lebih produktif” (Rangongo dan Ngwakwe, 2019). Sustainable Development Goals (SDGs) merumuskan tujuan SDG’s pada poin 9 mengenai infrastruktur: 9.1 yakni mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua (Bapennas, 2022).

Dalam laporan pada tahun 2019, World Economic Forum (WEF) mengungkapkan bahwa tingkat daya saing Indonesia masih tertinggal dari beberapa Negara Asean. Indonesia berada di posisi ke 5. Yang mana daya saing ini salah satunya dipengaruhi infrastruktur yang ada pada Negara, salah satunya infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Berkurangnya kualitas dan pelayanan dan tertundanya pembangunan infrastruktur akan menghambat laju pembangunan nasional. Upaya

pembenahan kondisi infrastruktur di Indonesia dianggap penting untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, dan mendorong terjadinya peningkatan PDRB pada setiap daerah. Infrastruktur yang baik tentunya akan mempengaruhi produktivitas masyarakat dan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang difokuskan pada pemberdayaan sumber daya manusia melalui pembangunan infrastruktur sosial yakni sektor pendidikan dan kesehatan.

Menurut World Bank (2016) pendidikan merupakan investasi dalam menumbuhkan ekonomi karena memberdayakan sumber daya manusia dengan berbagai keterampilan guna menumbuhkan ide-ide baru untuk produk, layanan, dan teknologi baru, tetapi ini membutuhkan kebijakan pemerintah yang proaktif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di semua negara di dunia. Pemerintah Indonesia dapat melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kesehatan dan pengetahuan masyarakat, salah satunya dengan menyediakan anggaran untuk kesehatan dan pendidikan. Todaro dan Smith (2006) menyatakan kesehatan dan pendidikan merupakan point penting dalam pembangunan perekonomian. Kesehatan dan pendidikan juga merupakan komponen penting dari pertumbuhan dan perkembangan dalam output agregat. Pendidikan menunjukkan hubungan dinamis yang kompleks dengan beberapa komponen kesejahteraan, termasuk kesehatan. Misalnya, pendidikan akan mempengaruhi pengetahuan akan kesehatan di masa dewasa; dan kesehatan serta pendidikan orang tua khususnya ibu akan berpengaruh pada anaknya kelak (Vogl, 2014). Hubungan tersebut demikian menjadi sangat

penting di negara berkembang, di mana tingkat pendidikan dan kesehatan masih tergolong rendah (Barro & Lee, 2011); Becker, Philipson, dan Soares (2005).

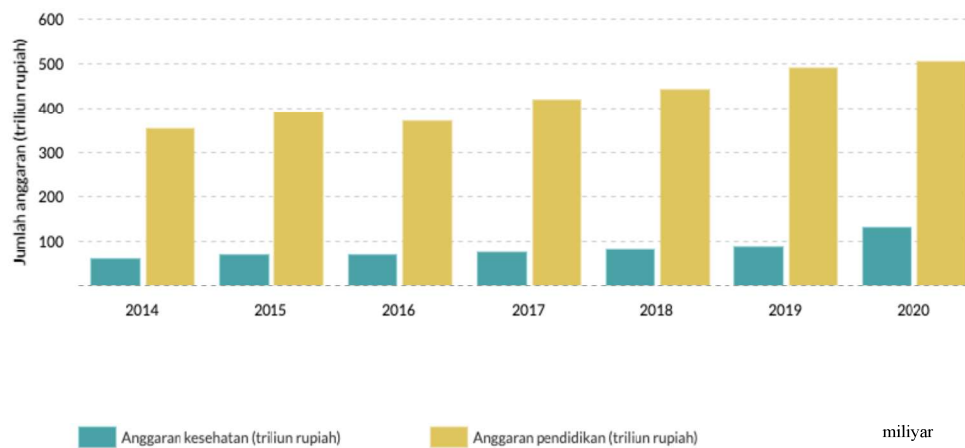
Tabel 1.1
Rasio Infrastruktur Sosial (Pendidikan dan Kesehatan) di Indonesia tahun 2015 dan 2019

NO.	Infrastruktur Sosial Indonesia	Tahun 2015		Tahun 2019	
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1	Infrastruktur Pendidikan	26.237 (unit)	1:615	30.093(unit)	1:540
2	Jumlah murid dan mahasiswa	16.128.783(orang)		16.245.870(orang)	
3	Infrastruktur Kesehatan	20.891(unit)	1:12070	25.244(unit)	1:10498
4	Jumlah Penduduk	252.164.800(orang)		266.918.700(orang)	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Rasio infrastruktur sosial berupa pendidikan dan kesehatan dengan penggunaanya secara umum semakin meningkat antara tahun 2015 dan tahun 2019. Namun angka rasio masih tergolong tinggi. Indikasi ini menunjukkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan di Indonesia perlu ditingkatkan. Kondisi seperti ini akan menyebabkan rendahnya mutu modal manusia (*human capital*) yang pada akhirnya akan mengakibatkan rendahnya tingkat produktivitas yang dihasilkan dari setiap kegiatan ekonomi.

Salah satu cara untuk melihat upaya pembangunan yang telah dilakukan pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan yakni dengan melihat pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan yang pembiayaanya bersumber dari dana APBD seluruh provinsi yang ada di Indonesia.



Sumber : Kementerian keuangan (2020)

Gambar 1-1. Anggaran Pemerintah untuk Pendidikan dan Kesehatan pada tahun 2014-2020

Dilihat dari gambar 1.2 anggaran pemerintah untuk pendidikan cenderung stabil, meski sempat menurun di tahun 2016, selanjutnya terus meningkat sampai tahun 2020. Sedangkan untuk anggaran kesehatan selalu meningkat tiap tahunnya. Anggaran kesehatan dan pendidikan dalam tujuh tahun terakhir terus konsisten berada pada angka masing-masing 5 persen dan 20 persen terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada pembacaan nota keuangan 2020, anggaran kesehatan tercatat Rp59,7 triliun sementara anggaran pendidikan yakni Rp353,4 triliun. Anggaran kesehatan meningkat 90,76 persen dari 2015 sebanyak Rp69,3 triliun sementara anggaran pendidikan meningkat 29,6 persen terhadap 2015 sejumlah Rp390,3 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan meningkat tiap tahunnya yang mana hal ini bertujuan agar seluruh masyarakat dapat menikmati pendidikan dan fasilitas kesehatan yang layak serta merata baik di daerah perkotaan maupun daerah yang terpencil.

Pemberdayaan di sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan angka tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), sebab peningkatan TPAK maka akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan salah satu ukuran yang sering dipakai untuk melihat fluktuasi dari partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi. TPAK didefinisikan sebagai perbandingan antara penduduk yang terlibat dalam kegiatan ekonomi atau disebut angkatan kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) terhadap seluruh penduduk usia kerja. Pada kelompok pemuda, TPAK merupakan proporsi pemuda (penduduk usia 15 tahun) yang terlibat dalam kegiatan ekonomi terhadap pemuda itu sendiri (Mirah, Kindangen, Rorong, 2020). Tingkat partisipasi angkatan kerja menurut 6 Pulau terbesar di Indonesia pada tahun 2005-2019 menunjukkan tren yang meningkat tiap tahunnya, tetapi masih terlihat kesenjangan antara pulau Jawa dan Bali dengan pulau lainnya. pada tahun 2005-2019 TPAK pada wilayah Jawa dan Bali paling tinggi, kemudian wilayah Kalimantan, disusul wilayah Sulawesi, kemudian wilayah Nusa Tenggara, dan wilayah Sumatera. Hal tersebut menunjukkan tingkat partisipasi antar daerah yang ada di Indonesia belum dapat dijangkau dan di optimalkan dengan maksimal.

Siddique, Moheyuddin, dan Kiani (2018) menyatakan bahwa kesehatan dan pendidikan merupakan hal yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi suatu perekonomian. Studi tersebut juga merekomendasikan agar berfokus pada pendidikan dan fasilitas kesehatan yang lebih baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di negara berpenghasilan rendah. Menurut

Baldacci et al (2004), pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan akan berdampak pada status kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. Pada penelitian tersebut ditemukan bahwa belanja publik yang lebih besar untuk pendidikan dasar dan menengah berdampak positif pada ukuran pencapaian pendidikan, dan peningkatan belanja perawatan kesehatan menurunkan angka kematian anak dan bayi. Jika alokasi pengeluaran untuk pendidikan dan perawatan kesehatan ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, pembuat kebijakan di banyak negara berkembang dan transisi perlu lebih memperhatikan alokasi dalam sektor-sektor ini.

Hasil penelitian Sharma (2018) dan Finlay (2007) menyatakan bahwa kesehatan masyarakat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dinyatakan juga bahwa modal manusia menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang berarti ada pengaruh kuat dari endogenitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian Odit, Dookhan, dan Fauzel (2010), serta Reza (2013) menyatakan bahwa pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut terjadi karena pendidikan menjadi penggerak peningkatan *output* karena benar-benar dapat meningkatkan produktivitas tiap individu. Penelitian juga menyatakan bahwa penduduk yang menempuh pendidikan adalah salah satu variabel kunci yang mempengaruhi perekonomian dan pertumbuhan negara.

Berdasarkan pengamatan di atas, hal ini menjadikan motivasi untuk melihat pengaruh infrastruktur pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Banyak studi sebelumnya yang meneliti tentang infrastruktur, tetapi

hanya fokus pada modal fisik, seperti transportasi, telekomunikasi, dan sebagainya. Selain menggunakan infrastruktur pendidikan, dan kesehatan, disini peneliti akan memperluas variabel penelitian untuk melihat kualitas SDM yang ada menggunakan variabel jumlah penduduk yang mengakses internet dan jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan. Dengan menggunakan regresi data panel dinamis GMM (*generalized method moment*) untuk melihat secara luas pengaruh infrastruktur pendidikan dan kesehatan di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), infrastruktur pendidikan yang berupa jumlah sekolah, jumlah penduduk yang mengakses internet, dan infrastruktur kesehatan yang berupa jumlah rumah sakit, dan jumlah peserta asuransi kesehatan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk menguji dan menganalisis pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), infrastruktur pendidikan yang berupa jumlah sekolah, jumlah penduduk yang mengakses internet, dan infrastruktur kesehatan yang berupa jumlah rumah sakit, dan jumlah peserta asuransi kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.”

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperoleh gelar magister ilmu ekonomi, dan untuk menerapkan pengetahuan yang didapat selama proses perkuliahan.

2. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi.

3. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi, bahan masukan ataupun pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan atau menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

1.5. Lingkup Penelitian

Kapital yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan pada 34 provinsi di Indonesia. Labor dalam penelitian ini dengan menggunakan variabel tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada 34 provinsi di Indonesia. Infrastruktur yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama yaitu jumlah sekolah SD, SMP, SMA dan SMK yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Yang kedua jumlah penduduk yang mengakses internet di 34 provinsi di Indonesia. Yang ketiga jumlah rumah sakit umum dan khusus di 34 provinsi di Indonesia. Yang keempat jumlah peserta asuransi kesehatan di 34 provinsi di Indonesia periode 2015-2019.

1.6. Sistematika Tesis

BAB I PENDAHULUAN

Yang mana didalamnya berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lingkup penelitian, dan sistematika tesis

BAB II LANDASAN TEORI

Membahas mengenai teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini yang bersumber dari kutipan buku, jurnal, dan berita. Kemudian penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian, kemudian kerangka konsep, dan terakhir model analisis dan penyusunan hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

Membahas mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, objek dan subjek penelitian, dan teknik analisis data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang gambaran umum infrastruktur pendidikan dan kesehatan di Indonesia, hasil estimasi persamaan, dan pembahasan hasil estimasi yang dihubungkan dengan teori dan penelitian terdahulu yang relevan.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan seluruh hasil penelitian dan saran kebijakan untuk pemerintah dan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA